



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/265/K/411.013/2025
TENTANG
ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2027

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan untuk menjaga pengendalian inflasi daerah tetap berada pada tingkat yang stabil sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/27/K/411.013/2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/396/K/411.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/27/K/411.013/2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2027.
- KESATU : Menetapkan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Roadmap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat program strategis, program kerja, target dan berdasarkan strategi kunci 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif) guna mencapai Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam rentang sasaran nasional.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan/atau sumber pendapatan lainnya yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

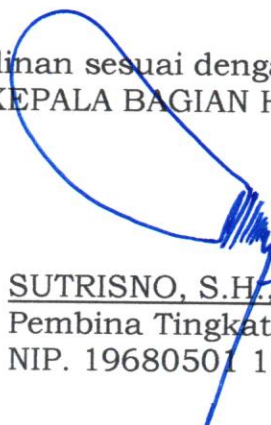
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 6 Mei 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/265/K/411.013/2025

TENTANG ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2027

PENJABARAN ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2027

4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA		TIMELINE TARGET			PIC
				2025	2026	2027	
1	2	3		4	5	6	7
Keterjangkauan Harga	Stabilisasi Harga	1.	Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat.	12 kali	12 kali	12 kali	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2.	Pengendalian stok atau ketersediaan kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	12 kali	12 kali	12 kali	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam system informasi perdagangan	264 hari	264 hari	264 hari	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		4.	Perluasan jangkauan dan waktu penyediaan kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi beras medium di wilayah Kab/Kota Kediri dan Nganjuk melalui jaringan RPK (Rumah Pangan Kita), mitra kerja, pengecer/pedagang pasar, BUMN/BUMD, Satgas	Berdasarkan penugasan/mandatori			Perum BULOG Kantor Cabang Kediri
		5.	Perum BULOG siap mendukung dan bekerjasama dalam kegiatan pasar murah/operasi pasar apabila ditugaskan	Berdasarkan penugasan/mandatori			Perum BULOG Kantor Cabang Kediri
	Mengelola Permintaan	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		-	Mengelola Permintaan	43 kali	2 kali	2 kali	
	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Optimalisasi edukasi dan Sosialisasi diversifikasi bahan pangan guna percepatan penganekaragaman konsumsi					
		-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsomsu Pangan	8 kali	2 kali	2 kali	
		-	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7 kali	1 kali	1 kali	
		-	Pembinaan Kelembagaan dan Distribusi Pangan	1 kali	1 kali	1 kali	

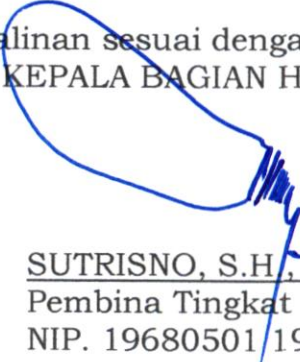
1	2	3	4	5	6	7
		- Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	2 kali	1 kali	1 kali	
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	160 pengelola	160 pengelola	160 pengelola	Dinas Koperasi dan UM
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.000 unit usaha	2.000 unit usaha	2.000 unit usaha	
		2. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	10 orang	25 orang	25 orang	
		3. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan UM	115 unit usaha	800 unit usaha	800 unit usaha	
		4. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan UM	10 orang	20 orang	20 orang	
	Program pengembangan UMKM	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, sdm serta desain dan teknologi	195 unit usaha	125 unit usaha	125 unit usaha	
Ketersediaan pasokan	Memperkuat Produksi dan Pengelolaan Impor-Ekspor Pangan	1. Peningkatan produksi tanaman pangan (melalui peningkatan produktivitas dan peningkatan indeks pertanaman)				Dinas Pertanian
		- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	1 Perda	-	Pembuatan peta by name by address	
		- Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	3 VUB	1 VUB	1 VUB	
		- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
		- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	100%	100%	100%	
		- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.000 ha	1.000 ha	1.000 ha	
		2. Peningkatan produksi ternak				
		- Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		- Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

1	2	3	4	5	6	7
		- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		- Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		- Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		- Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Penguatan Kelembagaan	1. Sosialisasi dan himbauan kepada petani untuk mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Dinas Pertanian			
		- Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5.000 m	5.000 m	5.000 m	
		- Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.000 m	1.000 m	1.000 m	
		- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
		2. Rekomendasi TDG	25 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	Dinas perindustrian dan perdagangan
	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	Menjaga level CBP dan mendukung penguatan mekanisme peningkatan CBP Nasional dengan penyerapan gabah beras di wilayah Kab/Kota Kediri dan Kab. Nganjuk	30.000 ton/tahun			BULOG
Kelancaran Distribusi	Promosi, Pemasaran dan penggunaan Produk Dalam Negeri	1. Promosi penggunaan produk dalam negeri	12 pelaku usaha	6 pelaku usaha	6 pelaku usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2. Pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, market place	10 pelaku usaha	10 pelaku usaha	10 pelaku usaha	
	Meningkatkan Infrastruktur	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan.	6 lokasi	2 lokasi	-	
	Penguatan KAD	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan			
		Penyedia Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Jumlah Armada Angkutan Sekolah Gratis dan Disabilitas)	6720 Kendaraan	7140 Kendaraan	7140 Kendaraan	
Komunikasi Efektif	Memperbaiki Kualitas Data	Menyiapkan sarana/alat pemantau harga barang di pasaran	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Koordinasi Pusat dan Daerah	1. Penyusunan peta jalan TPID sebagai tindak lanjut penetapan peta jalan pengendalian inflasi kabupaten	1 kali/tahun			Bagian Perekonomian

1	2	3	4	5	6	7
		2. Penguatan koordinasi dan sinergi TPID melalui kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi (Rakor) di tingkat kabupaten	2 kali	2 kali	2 kali	
	Mengendalikan Ekspektasi Inflasi	1. Operasi pasar reguler	6 kali	8 kali	10 kali	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2. Sosialisasi dan Publikasi melalui Website, Media Massa, Videotron, Flyer dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)				Dinas Kominfo
		- Publikasi Website	50 kali	75 kali	100 kali	
		Menampilkan infografis informasi harga kebutuhan pokok serentak di seluruh website 50 OPD dan 284 Desa/Kel.				
		- Media Massa (IG dan FB)	50 kali	75 kali	100 kali	
		Menampilkan infografis informasi harga kebutuhan pokok di IG FB simultan yang ditampilkan melalui Website.				
		- Layar Display/Signage	50 kali	75 kali	100 kali	
		Menampilkan infografis informasi harga kebutuhan pokok simultan yang ditampilkan melalui Website dan Medsos.				
		- Videotron	50 kali	75 kali	100 kali	
Menampilkan informasi dengan format gambar dan video terkait harga kebutuhan dan video pelaksanaan operasi pasar.						
- Traffic Voice Memberikan himbauan pada pengguna jalan saat tanda lampu menyala tanda berhenti.	25 kali	25 kali	25 kali			
- Radio Suara Anjuk Ladang Menyampaikan Update harga kebutuhan pokok setiap hari. Melaksanakan siaran dengan segmen Mbangun Desa Noto Kutho, Narasumber Lurah/Kades beserta perangkat dengan konsep bincang santai membahas program dan kegiatan yang telah ataupun yang akan dilaksanakan di Desa/Kel.	50 kali	75 kali	100 kali			
- Sosialisasi Tatap Muka pada Masyarakat	4 kali	4 kali	4 kali			

1	2	3		4	5	6	7
			Memberikan bimtek pada penggiat Medsos dan anak muda untuk meningkatkan kreatifitas membuat konten positif dan konten you tube sehingga dapat meningkatkan perekonomian.				
			- Sosialisasi Tatap Muka pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Memberikan bimbingan pada KIM agar lebih berdaya dalam menggunakan media sosial untuk melakukan wira usaha dan melakukan update informasi melalui website Desa yang telah disediakan, sehingga akan muncul keberagaman				
		2.	Optimalisasi Media (Cetak, Elektronik dan Internet)				
			Sebagai tools menjaga ekspektasi masyarakat khususnya pada saat HBKN.				
			- Memberikan bimbingan teknis pada masyarakat yang meliputi, KIM, ibu rumah tangga, para bakul pracangan dll agar dapat menawarkan/mengiklankan produknya melalui media cetak, melalui radio dan secara online hingga dapat memperoleh hasil. Yang dikemas dalam kegiatan bimtek Jurnalistik dan bijak dalam bermedia sosial.	4 kali	4 kali	4 kali	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI